

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Tahun 2023

OPD : Kecamatan Harau

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9	
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilih Gender)	Isu Gender	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
						Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base 1 Insa	Target Kinerja/Indikator Gender
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Tujuan : Peningkatan kualitas integrasi perencanaan	Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Harau berjumlah 150 orang, yang terdiri atas : 89 orang laki-laki (59,34%) dan 61 orang perempuan (40,66%). Atau laki-laki lebih banyak dari perempuan Dengan kata lain lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Persentase tingkat keikutsertaan perempuan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 31,43 % dari seluruh peserta yang hadir.	Dengan keterlibatan mayoritas laki-laki pada forum musrenbang tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb: 1) Dari aspek Partisipasi: Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam Musrenbang Kecamatan; 2) Belum tersedianya data pilih gender; 3) Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan; 4) terbatasnya kapasitas Perempuan.	1) Belum ditetapkannya persentase keterwakilan perempuan pada undangan Musrenbang Kecamatan; 2) Belum tersedianya data pilih gender; 3) Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan; 4) terbatasnya kapasitas Perempuan.	1) Sebagian besar perempuan masih susah untuk meninggalkan pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki; 2) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, Wali Nagari, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; 3) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan; 4) Kurangnya informasi dan pengetahuan perempuan tentang peran dan fungsinya dalam perencanaan.	1) Menetapkan persentase keterwakilan perempuan dalam peraturan lebih lanjut/Perbup tentang penyelenggaraan Musrenbang; 2) Memberikan pemahaman terhadap perempuan mengenai perencanaan pembangunan. 3) Melengkapi Perbup tentang penyelenggaraan Musrenbang dengan persentase keterwakilan perempuan.	1) Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang responsif Gender; 2) Mengadakan sosialisasi dan pembekalan tentang perencanaan kepada perempuan; 3) Melengkapi Perbup tentang penyelenggaraan Musrenbang dengan persentase keterwakilan perempuan.	Persentase keterwakilan perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 sebesar 40,66%	Persentase keterwakilan perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 sebesar 50%	
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Tujuan : Peningkatan kualitas integrasi perencanaan	Jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Harau mencapai kurang lebih 620 orang, yang diantaranya sekitar 52,10 % Laki-Laki dan sekitar 47,90 % Perempuan. Namun perempuan yang melakukan pengurusan belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, terutama bagi perempuan yang mempunyai balita yang masih berusia dibawah 2 tahun dan masih memberikan ASI.	1) Dari aspek pelayanan: Pelayanan belum dapat dilakukan dengan baik karena sebagian perempuan membutuhkan fasilitas khusus seperti ruang laktasi; 2) dari aspek akses: terbatasnya akses perempuan dalam melakukan pengurusan terutama disandingkan dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga; 3) Dari aspek Efisiensi Pelayanan: Keterbatasan pemahaman perempuan terhadap persyaratan pengurusan adm kependudukan menyebabkan sering ditolaknya permohonan yang diajukan; 4) Dari aspek Manfaat: sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus baik lansia dan perempuan karena keterbatasan akses kaum perempuan terhadap pelayanan PATEN Kecamatan.	1) Belum adanya ruang laktasi (ruang ibu menyusui); 2) Belum tersedianya data pelayanan untuk perempuan; 3) Adanya kesenjangan SDM, perempuan lebih banyak menjadi ibu rumah tangga dan berpendidikan rendah; 4) Belum adanya akses yang memudahkan perempuan untuk dapat menerima Pelayanan PATEN Kecamatan.	1) Kurangnya pendanaan untuk menunjang terpenuhinya sarana pelayanan untuk perempuan; 2) Sebagian besar perempuan karena fungsinya sebagai ibu rumah tangga masih belum bisa untuk meninggalkan pekerjaan rumah tangga; 3) Adanya budaya Patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal menjadi kepala keluarga; 4) Terbatasnya akses perempuan terhadap informasi dan birokrasi pemerintahan.	1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan PATEN terutama untuk perempuan; 2) Memberikan pemahaman mengenai pengurusan administrasi kependudukan; 3) Memberikan pemahaman terhadap terutama kepala keluarga tentang peran serta dalam mendukung dan mendampingi perempuan dalam pengurusan administrasi kependudukan.	1) Kegiatan PATEN Kecamatan yang responsif Gender; 2) Mendorong revisi peningkatan anggaran untuk prasarana penunjang responsif gender di Kecamatan; 3) Mendorong partisipasi keluarga dan masyarakat untuk lebih fokus mendampingi perempuan dalam pengurusan administrasi kependudukan.	Persentase perempuan yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Tahun 2022 sekitar 47,90 %	Persentase perempuan yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Tahun 2022 sebesar 50%	



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

OPD : KECAMATAN HARAU
TAHUN ANGGARAN : 2023

Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
Kode Kegiatan	7.01.03.2.01.01
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan Jumlah masyarakat yang mengikuti Musrenbang di Kecamatan Harau mencapai kurang lebih 150 orang yang lebih didominasi oleh laki-laki.
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
	<p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dari aspek Partisipasi: Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam Musrenbang Kecamatan; 2) dari aspek akses: terbatasnya akses perempuan dalam menyampaikan aspirasinya; 3) Dari aspek Kontrol: Keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah usulan dari Nagari bisa menjadi prioritas di tingkat kecamatan/kabupaten menjadi sangat terbatas; 4) Dari aspek Manfaat: sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus baik laki-laki dan perempuan karena keterbatasan akses kaum perempuan dan kontrol terhadap substansi dan usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang Kecamatan. <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum ditetapkannya persentase keterwakilan perempuan pada undangan Musrenbang Kecamatan; 2) Belum tersedianya data pilah gender; 3) Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan; 4) terbatasnya kapasitas Perempuan.

	<p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagian besar perempuan masih susah untuk meninggalkan pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki; 2) Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, Wali Nagari, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; 3) Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan; 4) Kurangnya informasi dan pengetahuan perempuan tentang peran dan fungsinya dalam perencanaan. 			
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolok Ukur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan persentase keterwakilan perempuan dalam peraturan lebih lanjut/Perbup tentang penyelenggaraan Musrenbang; 2) Memberikan pemahaman terhadap perempuan mengenai perencanaan pembangunan. 			
	<p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Persentase keterwakilan perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 sebesar 40,66%</p>			
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	<p>RP. 14.965.000,-</p>			
RENCANA AKSI	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang responsif Gender; 2) Mengadakan sosialisasi dan pembekalan tentang perencanaan pembangunan kepada perempuan; 3) Melengkapi Perbup tentang penyelenggaraan Musrenbang dengan persentase keterwakilan perempuan. 		
		<table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 14.965.000,-</td> </tr> </table>	Masukan	Rp. 14.965.000,-
		Masukan	Rp. 14.965.000,-	
		<table border="1"> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Sosialisasi dan advokasi untuk pembuat kebijakan tentang isu gender.</td> </tr> </table>	Keluaran	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Keluaran	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			
Hasil	Sosialisasi dan advokasi untuk pembuat kebijakan tentang isu gender.			
<table border="1"> <tr> <td>Hasil</td> <td>Tujuan: Agar pemegang kebijakan memahami isu gender dan memiliki komitmen PUG.</td> </tr> </table>	Hasil	Tujuan: Agar pemegang kebijakan memahami isu gender dan memiliki komitmen PUG.		
Hasil	Tujuan: Agar pemegang kebijakan memahami isu gender dan memiliki komitmen PUG.			

Tanjung Pati, Mei 2022



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

OPD : KECAMATAN HARAU
TAHUN ANGGARAN : 2023

Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
Kode Kegiatan	7.01.02.2.02.03
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan Jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Harau mencapai kurang lebih 620 orang, yang diantaranya sekitar 68,57 % Laki-Laki dan sekitar 31,43 % Perempuan. Namun perempuan yang melakukan pengurusan belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, terutama bagi perempuan yang mempunyai balita yang masih berusia dibawah 2 tahun dan masih memberikan ASI.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dari aspek pelayanan: Pelayanan belum dapat dilakukan dengan baik karena sebagian perempuan membutuhkan fasilitas khusus seperti ruang laktasi;2) dari aspek akses: terbatasnya akses perempuan dalam melakukan pengurusan terutama disandingkan dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;3) Dari aspek Efisiensi Pelayanan: Keterbatasan pemahaman perempuan terhadap persyaratan pengurusan adm kependudukan menyebabkan sering ditolaknya permohonan yang diajukan;4) Dari aspek Manfaat: sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus baik lansia dan perempuan karena keterbatasan akses kaum perempuan terhadap pelayanan PATEN Kecamatan. <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none">1) Belum adanya ruang laktasi (ruang ibu menyusui);2) Belum tersedianya data pilah gender;3) Adanya kesenjangan SDM, perempuan lebih banyak menjadi ibu rumah tangga dan berpendidikan rendah;4) Belum adanya akses yang memudahkan perempuan untuk dapat menerima Pelayanan PATEN Kecamatan.

	<p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya pendanaan untuk menunjang terpenuhinya sarana pelayanan untuk perempuan; 2) Sebagian besar perempuan karena fungsinya sebagai ibu rumah tangga masih belum bisa untuk meninggalkan pekerjaan rumahtangga; 3) Adanya budaya Patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal menjadi kepala keluarga; 4) Terbatasnya akses perempuan terhadap informasi dan birokrasi pemerintahan. 	
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolok Ukur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan PATEN terutama untuk perempuan; 2) Memberikan pemahaman terhadap perempuan mengenai pengurusan administrasi kependudukan; 3) Memberikan pemahaman terhadap terutama kepala keluarga tentang peran serta dalam mendukung dan mendampingi perempuan dalam pengurusan administrasi kependudukan. 	
	<p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Persentase perempuan yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Tahun 2022 sebesar 31,43 %</p>	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	<p>RP. 16.558.700,-</p>	
RENCANA AKSI	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan PATEN Kecamatan yang responsif Gender; 2) Mendorong revisi peningkatan anggaran untuk prasarana penunjang responsif gender di Kecamatan; 3) Mendorong partisipasi keluarga dan masyarakat untuk lebih fokus mendampingi perempuan dalam pengurusan administrasi kependudukan.
		<p>Masukan Rp. 16.558.700,-</p>
		<p>Keluaran Terlaksananya kegiatan pelayanan PATEN yang optimal di Kecamatan Harau. Tujuan: Agar modul dapat menampung isu-isu gender dalam modul.</p>
		<p>Hasil Terfasilitasinya kegiatan pelayanan PATEN di Kecamatan Harau. Tujuan: Agar pemegang kebijakan memahami isu gender dan memiliki komitmen PUG.</p>



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.61.00 KECAMATAN HARAU
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.61.00 KECAMATAN HARAU
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 14.965.000
 Jumlah 2024 : Rp. 18.106.625

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.965.000
Keluaran	Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 kegiatan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.965.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.965.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.965.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.155.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.155.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.000
	[#]					Rp. 30.000
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.125.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor	150 Porsi	porosi	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Makan Minum Pelatihan Selain di Hotel/ Penginapan, Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor	150 Porsi	porosi	7.500	0	Rp. 1.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.835.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 975.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 975.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	15 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 285.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	10 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 230.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	10 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 270.000
	PTT / Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	10 Orang / Hari	orang/jam	19.000	0	Rp. 190.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.860.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.860.000
	ATK Peserta Spesifikasi :	150 Paket	OP	15.000	0	Rp. 2.250.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 150.000
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	80.000	0	Rp. 80.000
	Pemimpin Lagu Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 80.000
	Spanduk Spesifikasi :	5 Meter	Meter	60.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.975.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.975.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.975.000
	Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Dekat	15 Orang / Hari	Orang/Hari	90.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Eselon III.b Spesifikasi : Kecamatan Dekat	15 Orang / Hari	Orang/Hari	85.000	0	Rp. 1.275.000
	Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Dekat	15 Orang / Hari	Orang/Hari	80.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Eselon IV.b, Staf Golongan IV Spesifikasi : Kecamatan Dekat	15 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp. 1.125.000
	Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Dekat	15 Orang / Hari	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Uang Harian Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Dekat	15 Orang / Hari	Orang/Hari	65.000	0	Rp. 975.000
Grand Total :						Rp. 14.965.000
		Kabupaten Lima Puluh Kota Camat Harau  ANDRI YASMEN, S.SoS NIP. 197209201992021001				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.61.00 KECAMATAN HARAU
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.61.00 KECAMATAN HARAU
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 16.558.700
 Jumlah 2024 : Rp. 18.079.668

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.558.700
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pelaksanaan PATEN serta jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	12 Laporan 225 kali
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 16.558.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.558.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.558.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 263.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 263.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 233.700
	[#]					Rp. 233.700
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	3 Rim	Rim	60.700	0	Rp. 182.100
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	3 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 51.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 30.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 16.295.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.295.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 16.295.000
	Uang Harian Eselon III.a Spesifikasi : Kecamatan Dekat	28 Orang / Hari	Orang/Hari	90.000	0	Rp. 2.520.000
	Uang Harian Eselon III.b Spesifikasi : Kecamatan Dekat	35 Orang / Hari	Orang/Hari	85.000	0	Rp. 2.975.000
	Uang Harian Eselon IV.a Spesifikasi : Kecamatan Dekat	50 Orang / Hari	Orang/Hari	80.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Staf Golongan III Spesifikasi : Kecamatan Dekat	60 Orang / Hari	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 4.200.000
	Uang Harian Staf Golongan II, I, PTT dan Non PNS Spesifikasi : Kecamatan Dekat	40 Orang / Hari	Orang/Hari	65.000	0	Rp. 2.600.000
Grand Total :						Rp. 16.558.700

	Kabupaten Lima Puluh Kota Camat Marau  ANDRI YASMEN, S.SoS NIP. 197209201992021001
--	--